



**PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN**



LKj - IP Tahun 2020

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KAB. SAROLANGUN**

Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karuniaNya. Sehingga kita selalu dalam lindunganNya.... Amin. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallahualaihiwasallam.

Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 merupakan wujud dari pemenuhan dan kewajiban pertanggungjawaban publik sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 menggunakan kriteria pengukuran kinerja seperti yang telah diuraikan dalam tata cara pengisian formulir LAKIP dan stimulasi dari Rencana Strategi Tahun 2017-2022 yang disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban yang memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun serta bukti hasil penyelenggaraan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel menuju pencapai *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jbaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj- IP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *incomes* di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJ ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh sebab itu kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan LKJ dimasa yang akan datang. Semoga LKJ ini benar-benar menjadi salah satu bukti tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

Sarolangun, Januari 202...

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SAROLANGUN

H. SAIPULLAH, S.Sos. MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640607 199003 1 005

Ikhtisar Eksekutif



Laporan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 merupakan Laporan kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan metode pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Kinerja diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017-2022 sebagai kontrak kinerja.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun ke depan. Hasil Evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
I.3.1 Tugas	3
I.3.2 Fungsi.....	3

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1. Perjanjian Kinerja SKPD.....	7
1.2.1 Tabel.....	8
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	11
2.2.1 Tabel.....	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	13
III.3.1 Tabel	14
III.3.2 Tabel	15
III.3.3 Tabel	16
3.2. Analisis Pencapaian Sasaran Tahunan	16
3.3. Realisasi Anggaran	17
III.3.3.1 Tabel	18

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	19
-----------------------	----

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

- 1. Latar Belakang**
- 2. Landasan Hukum**
- 3. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD**
 - 1.3.1 Tugas**
 - 1.3.2 Fungsi**

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Amanat Penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Dokumen perencanaan Strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja secara Teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sarolangun nomor 69 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun, maka disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2021, disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama periode 2021 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntunan reformasi

birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor. 04 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 76 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun maka secara spesifik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tugas pembantuan.

1.3.2 fungsi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta fasilitas umum; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Pertanahan.

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas tersebut diuraikan untuk masing-masing bidang sebagai berikut :

1. **Bidang Perumahan**

Tugas Pokok :

Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang perumahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan rencana kegiatan bidang perumahan;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan perumahan;
- c. Melaksanakan perumusan kebijakan dan regulasi kewenangan Kabupaten di bidang perumahan;
- d. Merumuskan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan;

- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan;
- f. Melaksanakan administrasi bidang perumahan;
- g. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perumahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

2. Bidang Kawasan Permukiman

Tugas Pokok :

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumahan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan rencana kegiatan di bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang kawasan permukiman;
- c. Melaksanakan perencanaan kawasan permukiman kumuh serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidangnya;
- e. Melaksanakan administrasi di bidang kawasan permukiman; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Pertanahan.

Tugas Pokok :

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan rencana kegiatan bidang pertanahan;
- b. Mensosialisasikan kebijakan di bidang pertanahan;
- c. Melaksanakan pengadaan tanah dan perizinan penggunaan tanah serta hokum dan penyelesaian sengketa tanah;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pada bidang pertanahan;dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja roganisasi.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Bab II berisi :

- 1. Perjanjian Kinerja SKPD**
- **Tabel 1.2.1**
- 2. Indikator Kinerja Utama**
- **Tabel 2.2.1**

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 30 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tanggal 31 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai wujud nyata Komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga terwujud.

Kerangka Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Periode 2017-2022 mengacu pada rencana strategis yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun guna mewujudkan Visi

" Sarolangun Lebih Maju dan Sejahtera "

Tabel 1.2.1.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Menurunnya Areal Kawasan Kumuh	Prosentase Areal Kawasan Kumuh	0 %
2	Meningkatkan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Pra Sejahtera	Prosentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan	44 %
3	Meminimalisir Kasus Sengketa Lahan dan Penataan Aset Tanah Pemerintah Kab. Sarolangun	Prosentase Kasus Sengketa Lahan Tertangani	5,92 %

II.1 Perjanjian Kinerja SKPD

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2017 – 2022.

Dalam rangka mewujudkan cita cita jangka menengah tersebut maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja akhir tahun anggaran 2020. Penetapan kinerja disajikan sebagaimana table berikut:

Tabel 1.2.1.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
			2020
1	Menurunnya Areal Kawasan Kumuh	Prosentase Areal Kawasan Kumuh.	0 %
	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni masyarakat pra sejahtera.	Prosentase pembangunan rumah tidak layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan	44 %
	Menurunnya kasus sengketa lahan dan penataan asset tanah pemerintah daerah	Prosentase kasus sengketa lahan tertangani	5,92 %

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahn yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H. SAIPULLAH, S.Sos, MH**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Sarolangun

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : **H. CEK ENDRA**
JABATAN : Bupati Sarolangun

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan, menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarolangun, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. CEK ENDRA

H. SAIPULLAH, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640607 199003 1 005

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2017-2022. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum	Prosentase berkurangnya areal Kawasan permukiman Kumuh	$\frac{\text{Luas Permukiman Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Permukiman Tertangani}} \times 100 \%$
	Menurunkan kasus sengketa tanah aset pemda dan penataan asset tanah pemda	Prosentase berkurangnya kasus sengketa tanah aset Pemda	$\frac{\text{Jumlah Sengketa Tanah Aset Pemda}}{\text{Jumlah Aset Tanah Pemda}} \times 100\%$
	Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur perumahan	Prosentase pembangunan perumahan dengan merenovasi rumah tidak layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan	$\frac{\text{Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

- 1. Capaian Indikator Kinerja Utama**
 - **Tabel III.3.1**
 - **Tabel III.3.2**
 - **Tabel III.3.3**
- 2. Analisis Pencapaian Sasaran Tahunan**
 - **III.2 Realiasi Anggaran**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Esensi pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip *good governance* dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi dalam pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91	Sangat Baik	
2.	75,1 – 90,0	Tinggi	
3.	65,1 – 75,0	Sedang	
4.	50,1 – 65,0	Rendah	
5.	$\leq 50,0$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Penghitungan nilai realisasi kinerja ini telah dilakukan pada Sistem AKIP secara elektronik (e-sakip).

III.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada

masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (*output, outcomes* dan *benefit*).

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk; 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja masing – masing Indikator sasaran tersebut, adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.1

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Menurunnya Areal Kawasan Kumuh.	Prosentase Areal Kawasan Kumuh.	%	0 %	144.98 %	7.249 %
2.	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni masyarakat pra sejahtera	Prosentase pembangunan rumah layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan	%	44 %	0.98 %	0.03 %
3.	Menurunnya kasus sengketa lahan dan penataan asset tanah pemerintah	Prosentase kasus sengketa lahan tertangani.	%	5,92 %	0 %	0 %

Tabel III.3.2

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Prosentase berkurangnya areal Kawasan permukiman Kumuh	Pelayanan Publik	570.382.396,-	APBD
2.	Prosentase berkurangnya kasus sengketa tanah aset Pemda	Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan Tanah	23.995.553,-	APBD
3.	Prosentase pembangunan perumahan dengan merenovasi rumah tidak layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan	Pengembangan Perumahan Rakyat	434.574.906,-	APBD

Tabel III. 3.3

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Formulasi 2020
1.	Prosentase berkurangnya areal Kawasan permukiman Kumuh	$\frac{\text{Luas Permukiman Kawasan Kumuh} \times 100 \%}{\text{Luas Permukiman Tertangani}}$	$\frac{127.09 \text{ Ha} \times 100 \%}{87.66 \text{ Ha}} = 144.98 \%$
	Prosentase berkurangnya kasus sengketa tanah aset Pemda	$\frac{\text{Jumlah Sengketa Tanah Aset Pemda} \times 100\%}{\text{Jumlah Aset Tanah Pemda}}$	$\frac{0 \text{ Kasus} \times 100\%}{926 \text{ Aset Tanah}} = 0 \%$
	Prosentase pembangunan perumahan dengan merenovasi rumah tidak layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan	$\frac{\text{Rumah Tidak Layak Huni} \times 100\%}{\text{Jumlah Rumah}}$	$\frac{622 \text{ Rumah} \times 100\%}{63.540 \text{ Rumah}} = 0.98 \%$

III.2 Analisis Pencapaian Sasaran Tahunan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2021, dalam Indikator Kinerja Utama terdapat target, realisasi dan capaian. Dalam target tahun 2021 Prosentase Areal Kawasan Kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun mencapai target dan realisasinya juga adalah **144,98 %** sedangkan realisasi yang dicapai **7,249%**. Prosentase Berkurangnya Kasus Sengketa Tanah Pemda mencapai target dan realisasinya adalah **0%** sedangkan realisasi yang dicapai **0%**, dalam hal ini tidak adanya kasus sengketa lahan yang terjadi ditahun 2021, Prosentase pembangunan perumahan dengan merenovasi rumah tidak layak huni untuk

mengurangi tingkat kemiskinan mencapai target dan realisasinya **0.98%** dan realisasi yang dicapai **0,03%**

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini juga terdapat kendala dan tantangan yang mendukung Program Kawasan Kumuh, Sengketa Tanah Aset Pemda dan Rumah Tidak Layak Huni, ini diantaranya sebagai berikut :

1. SDM yang masih terbatas, baik jumlah maupun Tingkat Pendidikannya.
2. Keterbatasan anggaran, dalam pelaksanaan program.
3. Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik.
4. Masih adanya wilayah di Kabupaten Sarolangun yang sulit dijangkau dan tertinggal.
5. Tidak adanya transparansi masyarakat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah dan sulitnya komunikasi terhadap masyarakat bersangkutan.

Dalam kendala dan tantangan dalam Indikator Kinerja Utama ini juga terdapat keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun :

1. Berkurangnya wilayah permukiman kumuh.
2. Berkurangnya rumah tidak layak huni.
3. Tidak adanya kasus sengketa lahan.

III.3 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung pada tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

Tabel III.3.3.1

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.413.636.662	542.845.674	38,40%
2.	Program Pengelolaan Izin Lokasi	89.855.092	47.402.143	52,75%
3.	Program Kawasan Permukiman	665.330.785	94.948.389	14,27%
4.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	23.995.553	-	0,00%
5.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.520.189.862	622.051.594	40,92%

Sumber : Lppk 2021 Dinas Perkimtan

BAB IV

Penutup

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun secara umum terlihat peningkatan yang signifikan atas sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 – 2022, dengan 3 (tiga) IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022. Sejumlah 3 (tiga) IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagaijabaran dari visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja, rata-rata realisasi kinerja dengan kategori **Sangat Baik**. Cukup menjadi acuan Dinas ini kedepan.

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun periode tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun untuk periode 1 (satu) tahun.

4.1 Kesimpulan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun, ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak

ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masa masa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian LKj-IP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 maka dapat diselesaikan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sarolangun.

Sarolangun, Januari 202...

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sarolangun

H. SAIPULLAH, S.Sos, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640607 199003 1 005